

Kembangkan Green Economy, Pemerintah Dorong Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

HM.4.6/190/SET.M.EKON.3/06/2023

Kembangkan Green Economy, Pemerintah Dorong Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Jakarta, 6 Juni 2023

Pencapaian target pembangunan berkelanjutan terus menjadi prioritas utama Pemerintah sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan iklim global melalui penerapan ekonomi hijau hingga saat ini. Upaya tersebut ditunjukkan Pemerintah melalui komitmen dalam mendorong penyediaan sumber daya yang optimal guna mengakselerasi transisi energi berkelanjutan.

Dalam *International Seminar Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy*, Selasa (6/06), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menerangkan bahwa komitmen Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tersebut juga ditunjukkan dengan meningkatkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada *National Determined Contributions* (NDC) yang menggunakan kemampuan sendiri sebesar 29% menjadi 31,89% dan dengan dukungan internasional sebesar 41% menjadi 43,20%.

“Mempromosikan ekonomi hijau sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan merupakan suatu keharusan untuk kebaikan global. Selain itu, kita juga harus berfokus untuk merangkul setiap peluang guna mencapai transisi yang adil dan terjangkau,” ungkap Sesmenko Susiwijono.

Lebih lanjut, komitmen Pemerintah tersebut juga diwujudkan dalam berbagai upaya mulai dari memperkuat kolaborasi sektor swasta, mendorong pembiayaan inovatif dengan membentuk *Sovereign Wealth Fund*, melakukan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap memperhatikan dimensi lingkungan, serta berkontribusi dalam *Just Energy Transition Partnership* dengan meluncurkan Rencana Investasi Komprehensif sebesar USD20 miliar.

Selain itu, guna mempromosikan transisi hijau dari sisi permintaan, Pemerintah juga memberikan insentif untuk mempercepat sektor bisnis energi terbarukan dan ramah lingkungan, seperti pembebasan pajak dan tunjangan, pembebasan bea masuk, dan pengurangan PPN dan pajak barang mewah, penetapan tarif pajak berdasarkan emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar, serta insentif untuk pembelian kendaraan listrik.

Di samping berbagai kebijakan tersebut, strategi pengelolaan fiskal yang optimal juga perlu menjadi fokus Pemerintah untuk memobilisasi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, Sesmenko Susiwijono juga menuturkan bahwa lembaga audit Pemerintah turut memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan pembiayaan guna mendorong transisi ekonomi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan dengan tepat sasaran.

“Alokasi keuangan untuk investasi yang paling efektif dan efisien bergantung pada analisis dampak, pelaporan, dan verifikasi. Untuk itu, kita harus memastikan bahwa lembaga audit berjalan dengan efektif

untuk dapat mencapai transformasi ekonomi dan tujuan global tersebut,” pungkas Sesmenko Susiwijono.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Nasional Kemenko Perekonomian, serta Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. (dft/fsr)

**Kepala Biro Komunikasi, Layanan, Informasi dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto**

Website: www.ekon.go.id

Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI

Email: humas@ekon.go.id

LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia